

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Beli Antivirus Rp 384 Juta, Tertulisnya Rp 12,9 Miliar

Gambir, Warta Kota

PEMROV DKI mengajukan anggaran Rp 12,9 miliar untuk pengadaan antivirus dan perangkat teknologi informasi. Total ada tiga kegiatan dari anggaran sebesar itu.

Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI, Muhammad Nurrahman mengatakan, anggaran Rp 12,9 miliar itu akan digunakan untuk tiga kegiatan yakni pembelian antivirus, pengadaan Microsoft Office dan database Oracle.

"Kelihatannya begitu ya, Rp 12 miliar itu kesannya antivirus, tapi ada tiga kegiatan. Jadi bukan satu kegiatan untuk antivirus, tapi ada tiga," kata Nurrahman di Balai Kota, Rabu (9/10).

Nurrahman mengatakan kegiatan yang paling menyedot anggaran adalah database

Oracle sebesar Rp 7,8 miliar.

"Oracle database itu untuk satu core-nya Rp 799.000, karena ada delapan core untuk tiap server. Hitungannya jadi Rp 7,8 miliar. Jadi yang besar di Oracle," katanya.

Sedangkan pembelian Microsoft Office butuh dana hingga Rp 4 miliar. "Kita beli (Microsoft Office) yang 2016. Mulai tingkat kelurahan di 276 kelurahan, 44 kecamatan, 6 sudin dan di dinas," ungkapnya.

Sementara untuk pembelian antivirus, Nurrahman mengatakan hal itu tidak seperti yang dibayangkan. Pemprov DKI hanya butuh Rp 384 juta untuk membeli antivirus.

"Kalau antivirus Rp 384 juta satu tahun, kalau untuk antivirus, rutin (beli) setiap tahun karena ada upgrade. Jadi setiap tahun kita beli, sewa setiap tahunnya karena

ada penambahan terus, seperti virus yang terus berkembang dan sebagainya," katanya.

Sewa

Sebelumnya anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana menyoroti anggaran antivirus sebesar Rp 12,9 miliar yang diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020.

Anggaran tersebut diusulkan oleh Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI.

"Selama ini kan sewa aja tuh antivirus, sekarang beli antivirus plus perangkat lunaknya," ujar William seperti dilansir Kompas.com.

William meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan

Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.

Nama kegiatannya ialah penyediaan lisensi perangkat lunak dan antivirus. Dalam kolom target tertulis "3 jenis". Plafon anggaran sementara ialah Rp 12.917.776.000 (Rp 12,9 miliar).

Anggaran yang diusulkan Pemprov DKI itu akan dibahas dan disetujui DPRD DKI Jakarta. Anggaran itu kemudian akan dievaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Pembahasan KUA-PPAS 2020 belum dilaksanakan karena DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 belum membentuk alat kelengkapan DPRD.

Pembentukan alat kelengkapan DPRD DKI masih menunggu pimpinan definitif DPRD DKI mengucapkan sumpah jabatan. (jhs)

Jadi bukan satu kegiatan untuk antivirus, tapi ada tiga.

M Nurrahman
Kepala UP
Teknologi Informasi
Kependudukan DKI

alasan pembelian antivirus tersebut. "Semua itu harus dijelaskan. Ini harus ada pembahasan," kata William.

Dalam dokumen KUA-PPAS 2020, anggaran pembelian antivirus tercantum dalam pos anggaran Unit Pengelola Teknologi